



RENCANA KERJA

***DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas yaitu penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Rencana kerja tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023. Dalam urusan Lingkungan Hidup Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan kepada masyarakat.

Palu, 20 Mei 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH


M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19720225 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	53
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	53
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB 5 PENUTUP	87
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023. Renja OPD merupakan

dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup lebih difokuskan pada substansi kebijakan yang sesuai dengan Visi Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka mereduksi fenomena pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
5. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
39. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

42. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tanggal 17 November 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
44. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah.
45. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. Sedangkan tujuan dari tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Acuan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Provinsi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan dibidang lingkungan hidup dalam tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana kerja (renja) ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan pengukuran kinerja kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2022	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	62	-	-	-	-	62	0	0.00
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	-	-	-	-	3	0	0.00
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	1	-	-	-	-	1	0.5	50.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	89	-	-	-	-	89	37.98	42.67
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	-	-	-	-	63	63	100.00
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	-	-	-	-	2	1	50.00
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	-	-	-	1	1	100.00
5.1.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	-	-	-	-	100		0.00
5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	-	-	-	-	2	0	0.00
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	-	-	-	-	2	0	0.00
5.1.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	-	-	-	-	2	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24	-	-	-	-	24	10	41.67
5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	-	-	-	-	55	30	54.55
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Wajib Perencanaan Lingkungan Hidup	60	-	-	-	-	60	0	0.00
2.11.02.101	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ validasi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.02.101.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.02.102	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS Yang disusun dan diverifikasi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.02.102.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	41.67	-	-	-	-	41.67	0	0.00
2.11.03.101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11	-	-	-	-	11	0	0.00
2.11.03.101.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03.101.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup Yang dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.03.103	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi rehabilitasi dan restorasi	3	-	-	-	-	3	0	0.00
2.11.03.103.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03.103.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03.103.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dilakukan pembinaan	100	-	-	-	-	100	0	0.00
2.11.04.101	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola dan dilakukan pembinaan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.04.101.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	-	-	-	-	1	1	100.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.04.101.02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.04.101.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	5	-	-	-	-	5	1	20.00
2.11.04.101.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	2	-	-	-	-	2	0	0.00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	78	-	-	-	-	78	0	0.00
2.11.05.101	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	22,332.61	-	-	-	-	22,332.61	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.05.101.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.05.101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	58.23	-	-	-	-	58.23	32.91	56.52

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.06.101	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina/diawasi	92	-	-	-	-	92	52	56.52
2.11.06.101.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20	-	-	-	-	20	12	60.00
2.11.06.101.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui yang ditingkatkan kapasitasnya	100	-	-	-	-	100	0	0.00
2.11.07.101	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui	2	-	-	-	-	2	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.07.101.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.07.102	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	2	-	-	-	-	2	0	0.00
2.11.07.102.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	76.9	-	-	-	-	76.9	0	0.00
2.11.08.101	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	2	-	-	-	-	2	0	0.00
2.11.08.101.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.08.101.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.08.101.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	70.5	-	-	-	-	70.5	0	0.00
2.11.09.101	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diberikan/ dilaksanakan ditingkat Provinsi	6	-	-	-	-	6	0	0.00
2.11.09.101.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6	-	-	-	-	6	0	0.00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	100	-	-	-	-	100	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.10.101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	3	-	-	-	-	3	0	0.00
2.11.10.101.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3	-	-	-	-	3	0	0.00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	42	-	-	-	-	42	0	0.00
2.11.11.101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan dan Pengelolaan Timbulan Sampah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.11.101.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.11.101.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penganan Sampah pada Kondisi Khusus	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.11.101.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.11.101.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah volume sampah dari kerjasam penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	500	-	-	-	-	500	0	0.00
UPT LABORATORIUM										
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	62	-	-	-	-	62	0	0.00
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	-	-	-	-	7	0	0.00
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	-	-	-	1	0	0.00
5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	-	-	-	-	2	0	0.00

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	-	-	-	-	7	0	0.00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	41.67	-	-	-	-	41.67	0	0.00
2.11.03.101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	-	-	-	-	1	0	0.00
2.11.03.101.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	25	-	-	-	-	25	10	40.00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka nomenklatur program dan kegiatan tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan dan berbeda dari nomenklatur tahun 2020.

Dari tabel diatas ada target yang belum tercapai dikarenakan pandemi dan pemangkasan anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang harus berkurang anggarannya. Namun ada juga target yang tercapai dikarenakan komitmen dan kerjasama beberapa pihak sehingga kegiatan tetap terlaksana yang berimplikasi pada realisasi capaian target kinerja output dan outcome.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu

prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2022 dan Prakiraan 2023**

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun				Tahun		Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kualitas Air	55,84	65,29	65,39	65,49	55,84	0	65,39	65,49	
2	Indeks Kualitas Udara	91,33	90,38	90,49	90,59	91,33	0	90,49	90,59	
3	Indeks Kualitas Air Laut	87,36	70,62	71,21	71,81	87,36	0	71,21	71,81	
4	Emisi Gas Rumah Kaca	-	187.29 4,85	193.44 9,42	199.68 4,41	-	0	193.4 49,42	199. 684, 41	

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah, pada dasarnya kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai "*Pendukung*". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas- tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishment*), dan kesejahteraan pegawai.

- b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur di bidang lingkungan hidup.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Lingkungan hidup.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan

publik, dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup.

- b. Melaksanakan kegiatan yang terintegrasi satu OPD dengan yang lainnya.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang SPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporandan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung pengelolaan sumber daya alam dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
 - b. Peningkatan kegiatan yang berkualitas guna mendukung peningkatan kualitas SDA dan lingkungan hidup secara holistic.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan berdasarkan keinginan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana atau bagian yang menangani perencanaan sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan dibidang lingkungan hidup mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme kegiatan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan swasta.

Namun peningkatan kegiatan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk kegiatan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Kualitas Sumberdaya aparatur baik perencanaan dan teknis yang memiliki kompetensi khususnya di bidang lingkungan hidup relatif masih terbatas;
2. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi stakeholder (para pihak) dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini ditandai dengan masih sedikitnya kelompok peduli terhadap lingkungan, sehingga percontohan/demplot pengelolaan lingkungan belum berkembang dengan baik;
3. Keberpihakan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibanding sektor lain. Hal ini terjadi karena pengelolaan lingkungan hidup masih sebagai pelengkap pembangunan daerah dan belum dijadikan arus utama pembangunan;
4. Para pelaku usaha, pengambil kebijakan dan masyarakat sebagian besar masih beranggapan bahwa melakukan suatu proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal (biaya produksi meningkat, keuntungan berkurang dan menghambat investasi).
5. Meningkatnya aktivitas transportasi sebagai akibat dari peningkatan kegiatan ekonomi berdampak pada meningkatnya pencemaran seperti CO, Nox, HC. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini akan berbanding lurus dengan memburuknya kualitas udara;

6. Permasalahan lingkungan terutama di daerah perkotaan adalah belum dapat menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*), meningkatnya limbah cair, padat dan B3 baik domestik maupun industri, penyerobotan daerah sepadan sungai dan terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini berpengaruh pada estetika lingkungan dan ancaman pencemaran;
7. Ancaman bencana alam yang meliputi gempa bumi, tanah longsor, krisis air (kekeringan, banjir, tercemar) dan pengurusan berlebihan air tanah;
8. Belum optimalnya koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
9. Belum tersusunnya perencanaan pengelolaan lingkungan yang lengkap dan menyeluruh yang menjadi dasar penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Belum optimalnya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang lingkungan hidup;
11. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
12. Masih terbatasnya data base (basis data) dan/atau informasi lingkungan yang yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang lingkungan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara terperinci review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 jika dibandingkan dengan hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPd tahun 2023
Provinsi Sulawesi Tengah**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	64	9,041,533,767	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	64	9,483,047,997
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Nilai SAKIP	80	7,884,230	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Nilai SAKIP	80	7,884,230
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3	2,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3	2,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	2,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3,884,230	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3,884,230
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	90	7,817,533,767	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	90	7,817,533,767
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	6,841,533,767	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	6,841,533,767
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	946,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	946,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	30,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	30,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	30,000,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	30,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	30,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	350,985,770	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	792,500,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7,500,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	130,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	130,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	20,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	15,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	168,485,770	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	610,000,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1	10,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1	10,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	200,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	200,000,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	200,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	200,000,000
	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	260,100,000	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	260,100,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu		1	165,100,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu		1	165,100,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu		1	95,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu		1	95,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	375,030,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	375,030,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	330,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	330,000,000
	Pemeliharaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	2,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	2,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	43,030,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	43,030,000
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Ketersediaan Dokumen Wajib Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	550,000,000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Ketersediaan Dokumen Wajib Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	550,000,000
	Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ validasi	2 Dokumen	50,000,000	Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ validasi	2 Dokumen	50,000,000
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kab. Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Kota Palu	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen/Rekomendasi	50,000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kab. Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Kota Palu	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen/Rekomendasi	50,000,000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah Dokumen KLHS Yang disusun dan diverifikasi	1 Dokumen	500,000,000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah Dokumen KLHS Yang disusun dan diverifikasi	1 Dokumen	500,000,000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Palu	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	500,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Palu	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	500,000,000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	55,56 Persen	400,000,000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	55,56 Persen	795,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	13 Lokasi	150,000,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	13 Lokasi	500,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Morowali, Poso, Parigi Moutong	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 Dokumen	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Morowali, Poso, Parigi Moutong	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 Dokumen	350,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi, Kota Palu	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup Yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi, Kota Palu	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup Yang dilaksanakan	1 Dokumen	150,000,000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah masyarakat yang diberikan informasi	30 Orang	70,000,000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah masyarakat yang diberikan informasi	30 Orang	70,000,000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Laporan	70,000,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Morowali	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Laporan	70,000,000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Lokasi rehabilitasi dan restorasi	7 Lokasi	180,000,000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Lokasi rehabilitasi dan restorasi	7 Lokasi	225,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Banggai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Banggai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Banggai, Morowali, Poso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Banggai, Morowali, Poso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	50,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kab. Tolitoli	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kab. Tolitoli	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	75,000,000
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dilakukan pembinaan	100 Persen	150,000,000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dilakukan pembinaan	100 Persen	150,000,000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah Taman KEHATI yang dikelola dan dilakukan pembinaan	2 Taman Kehati	150,000,000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah Taman KEHATI yang dikelola dan dilakukan pembinaan	2 Taman Kehati	150,000,000
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	25,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	25,000,000
	Pengelolaan Tanam Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan	13 Kab/Kota	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Lokasi/5 Ha	80,000,000	Pengelolaan Tanam Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan	13 Kab/Kota	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Lokasi/5 Ha	80,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Pengembangan Kapasitas Kelembangan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Palu, Kab. Sigi	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang	25,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembangan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Palu, Kab. Sigi	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang	25,000,000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1 Unit	20,000,000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1 Unit	20,000,000
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang dikelola	75 Persen	100,000,000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang dikelola	75 Persen	100,000,000
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Limbah B3 yang dikelola	33.332.609 Ton	100,000,000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Limbah B3 yang dikelola	33.332.609 Ton	100,000,000
	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah Dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Fasilitas/persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10,000,000	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah Dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Fasilitas/persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan dengan Pemerintah Pusat Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1	90,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan dengan Pemerintah Pusat Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1	90,000,000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	63,04	200,000,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	63,04	200,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina/diawasi	116	200,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina/diawasi	116	200,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Palu	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20	50,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Palu	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20	50,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	150,000,000
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH		Persentase MHA yang diakui yang ditingkatkan kapasitasnya	100	40,000,000	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH		Persentase MHA yang diakui yang ditingkatkan kapasitasnya	100	75,000,000
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui	3	40,000,000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui	3	75,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Keafifan Lakol Pengetahuan Tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	40,000,000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Keafifan Lakol Pengetahuan Tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	75,000,000
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	84,6	150,000,000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	84,6	185,000,000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3	150,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3	185,000,000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	1	10,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	1	40,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Palu, Kab. Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Morowali Utara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	115,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Palu, Kab. Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Morowali Utara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	115,000,000
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kota Palu	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1	25,000,000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kota Palu	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1	30,000,000
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	76,5	35,000,000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	76,5	50,000,000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diberikan/dilaksanakan ditingkat Provinsi	6	35,000,000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diberikan/dilaksanakan ditingkat Provinsi	6	50,000,000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Kota Palu	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6	35,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Kota Palu	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6	50,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	100	50,000,000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	100	50,000,000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	3	50,000,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	3	50,000,000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	13 Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	3	50,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	13 Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	3	50,000,000
11	Program Pengelolaan persampahan		Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	43	275,000,000	Program Pengelolaan persampahan		Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	43	275,000,000
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah Dokumen Hasil Penanganan dan Pengelolaan Timbulan Sampah	1	275,000,000	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah Dokumen Hasil Penanganan dan Pengelolaan Timbulan Sampah	1	275,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1	20,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1	20,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1	20,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1	20,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kota Palu	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	1	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kota Palu	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	1	20,000,000
	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kota Palu	Jumlah volume sampah dari kerjasam penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	500	45,000,000	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kota Palu	Jumlah volume sampah dari kerjasam penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	500	45,000,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1	170,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1	170,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP					UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	64	725,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	64	725,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	90	276,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran	90	276,000,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	276,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	276,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	40,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	40,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	235,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	235,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	235,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	235,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	120,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	120,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54,000,000
	Penyediaan Administrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	30,000,000	Penyediaan Administrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	30,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	24,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	24,000,000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	55,56 Persen	75,000,000	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	55,56 Persen	75,000,000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Sampel yang dianalisis	25	75,000,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Sampel yang dianalisis	25	75,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	13 Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	30	75,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	13 Kab/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	30	75,000,000
--	--	-------------	---	----	------------	--	-------------	---	----	------------

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pelaksanaan musrenbang kecamatan (bila sudah dilakukan).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan usulan dari masyarakat dalam kegiatan MUSRENBANG yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup. Adapun usulan-usulan dalam MUSRENBANG tersebut antara lain: pembuatan tong sampah, dump truk sampah dan pengadaan kendaraan sampah. Semua usulan-usulan tersebut diakomodir dan akan dilakukan dengan skala prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.

**Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Usulan : Pengadaan dump truk sampah, kendaraan sampah di Kota Palu, Morowali dan Tojo Una-Una				Usulan Kabupaten/Kota dalam Forum OPD

2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Usulan : Pemantauan kualitas air laut di Kab. Banggai Laut				Usulan Kabupaten/Kota dalam Forum OPD

BAB 3

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan program yang diselaraskan dengan kebijakan nasional tentang penanganan pemanasan global dan penanganan efek Gas Rumah Kaca (GRK) serta Program Nasional Menuju Indonesia Hijau (MIH). Untuk pelaksanaan program tersebut di aplikasikan dalam bentuk kegiatan pengelolaan kehati dan ekosistem serta pembangunan, penataan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk kebijakan nasional tentang penanganan pencemaran dengan target terukur pada media air dan udara sebesar 50%, terkelolanya limbah B3, serta target terlihat yaitu seluruh kabupaten dan kota dapat diukur kualitas lingkungannya dalam indeks yang *dipercaya masyarakat*, data kualitas air dan udara daerah yang lengkap serta data pengawasan kegiatan potensi merusak seperti pertambangan serta data lahan kritis, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah akan mewujudkannya dalam kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim serta dalam bentuk kegiatan-kegiatan berupa pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan (*objectives*) merupakan penjabaran dari pernyataan misi, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan juga bisa diartikan sebagai penjabaran yang lebih spesifik, namun belum bisa diukur, dari *apa yang ingin sebenarnya dicapai dengan menjalankan misi* yang telah

ditetapkan. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa apabila tujuan telah tercapai maka dengan sendirinya misi juga telah dicapai.

Tujuan utama (*main objectives*) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu *mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas*. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan beberapa tujuan khusus atau sub tujuan (*specific objectives*) yaitu;

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau dan teduh.
2. Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (kualitas air dan udara).
3. Meningkatkan (cakupan) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4. Mengoptimalkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
5. Menciptakan rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam
6. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Meningkatkan pengendalian polusi
8. Meningkatkan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi hutan, pesisir dan laut.
9. Meningkatkan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
10. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau.
11. Meningkatkan pengendalian kerusakan ekosistem dan konservasi keanekaragaman hayati dengan mempertahankan tutupan hutan Sulawesi Tengah.
12. Meningkatkan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
13. Meningkatkan penegakkan hukum lingkungan.
14. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan.

15. Meningkatkan kapasitas penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
16. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan utama diatas, perlu dirumuskan sasaran. Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur (*measurable*) yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran utama (*main goal*) Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu terwujudnya harmonisasi *Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan*. Indikator pencapaian sasaran utama ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Penurunan Emisi GRK.

Sementara itu, penetapan indikator kinerja sasaran (tingkat manfaat) mempertimbangkan kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta kapasitas pengelolaan lingkungan hidup DLH Provinsi Sulawesi Tengah karena keberhasilannya dipengaruhi oleh dukungan program dan kegiatan dari OPD/instansi lain dan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran-sasaran khusus tersebut, DLH Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti instansi kehutanan pusat dan daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi dan masyarakat. Penyusunan indikator kinerja sasaran memperhatikan hirarki indikator antara sasaran, program dan kegiatan.

3.3 Program Dan Kegiatan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Urusan Lingkungan Hidup disertai Urusan

Wajib Non Pelayanan Dasar dengan 10 Program teknis dengan 13 kegiatan teknis, yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1.3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 3.1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - 3.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 4.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 5.1 Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - 6.1 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 - 7.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 9.1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
10. Program Pengelolaan Persampahan.
 - 10.1 Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

**Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Tengah**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
5.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		64	9,041,533,767	APBD		66	10,397,763,832
5.1.01.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP		80	7,884,230	APBD		82	9,066,865
5.1.01.1 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Palu	3	2,000,000	APBD		3	2,300,000
5.1.01.1 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Palu	1	2,000,000	APBD		1	2,300,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.1 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1	3,884,230	APBD		1	4,466,865
5.1.01.1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		90	7,817,533,767	APBD		91	8,990,163,832
5.1.01.1 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	1	6,841,533,767	APBD		1	7,867,763,832
5.1.01.1 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	1	946,000,000	APBD		1	1,087,900,000
5.1.01.1 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1	30,000,000	APBD		1	34,500,000
5.1.01.1 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1	30,000,000	APBD		1	34,500,000
5.1.01.1 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1	30,000,000	APBD		1	34,500,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1	350,985,770	APBD		1	403,633,636
5.1.01.1 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1	7,500,000	APBD		1	8,625,000
5.1.01.1 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1	130,000,000	APBD		1	149,500,000
5.1.01.1 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1	20,000,000	APBD		1	23,000,000
5.1.01.1 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1	15,000,000	APBD		1	17,250,000
5.1.01.1 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	1	168,485,770	APBD		1	193,758,636
5.1.01.1 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu	1	10,000,000	APBD		1	11,500,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	200,000,000	APBD		1	230,000,000
5.1.01.1 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1	200,000,000	APBD		1	230,000,000
5.1.01.1 08	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	260,100,000	APBD		1	299,115,000
5.1.01.1 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	1	165,100,000	APBD		1	189,865,000
5.1.01.1 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1	95,000,000	APBD		1	109,250,000
5.1.01.1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	375,030,000	APBD		1	431,284,500
5.1.01.1 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	1	330,000,000	APBD		1	379,500,000
5.1.01.1 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Palu	1	2,000,000	APBD		1	2,300,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.1 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	1	43,030,000	APBD		1	49,484,500
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Wajib Perencanaan Lingkungan Hidup		100 Persen	550,000,000	APBD		100 Persen	632,500,000
2.11.02 .101	Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ validasi		2 Dokumen	50,000,000	APBD		2 Dokumen	57,500,000
2.11.02 .101.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Kab. Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Kota Palu	2 Dokumen/ Rekomendasi	50,000,000	APBD		2 Dokumen/ Rekomendasi	57,500,000
2.11.02 .102	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS Yang disusun dan diverifikasi		1 Dokumen	500,000,000	APBD		1 Dokumen	575,000,000
2.11.02 .102.0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Kota Palu	1 Dokumen	500,000,000	APBD		1 Dokumen	575,000,000
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		55,56 Persen	400,000,000	APBD		69,44 Persen	460,000,000
2.11.03 .101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan		13 Lokasi	150,000,000	APBD		15 Lokasi	172,500,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

		Hidup							
2.11.03 .101.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Morowali, Poso, Parigi Moutong	2 Dokumen	100,000,000	APBD		2 Dokumen	115,000,000
2.11.03 .101.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup Yang dilaksanakan	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi, Kota Palu	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	57,500,000
2.11.03 .102	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang diberikan informasi		30 Orang	70,000,000	APBD		30 Orang	80,500,000
2.11.03 .102.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kab. Morowali	2 Laporan	70,000,000	APBD		2 Laporan	80,500,000
2.11.03 .103	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi rehabilitasi dan restorasi		7 Lokasi	180,000,000	APBD		10 Lokasi	207,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.03 .103.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kab. Banggai	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	115,000,000
2.11.03 .103.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Banggai, Morowali, Poso	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	57,500,000
2.11.03 .103.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kab. Tolitoli	1 Dokumen	30,000,000	APBD		1 Dokumen	34,500,000
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dilakukan pembinaan		100 Persen	150,000,000	APBD		100 Persen	172,500,000
2.11.04 .101	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola dan dilakukan pembinaan		2 Taman Kehati	150,000,000	APBD		2 Taman Kehati	172,500,000
2.11.04 .101.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Palu	1 Dokumen	25,000,000	APBD		1 Dokumen	28,750,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.04 .101.02	Pengelolaan Tanam Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	13 Kab/Kota	1 Lokasi /5 Ha	80,000,000	APBD		1 Lokasi/ 5 Ha	92,000,000
2.11.04 .101.06	Pengembangan Kapasitas Kelembangan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Palu, Kab. Sigi	2 Orang	25,000,000	APBD		2 Orang	28,750,000
2.11.04 .101.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Kab. Banggai Kepulauan, Sigi	1 Unit	20,000,000	APBD		1 Unit	23,000,000
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola		75 Persen	100,000,000	APBD		75 Persen	115,000,000
2.11.05 .101	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Limbah B3 yang dikelola		33.332.609 Ton	100,000,000	APBD		33.332.609 Ton	115,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.05 .101.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah Dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kota Palu	1 Dokum en	10,000,000	APBD		1 Dokume n	11,500,000
2.11.05 .101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	13 Kab/Kota	1	90,000,000	APBD		1	103,500,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi		63,04	200,000,000	APBD		63,04	230,000,000
2.11.06 .101	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina/diawasi		116	200,000,000	APBD		11600%	230,000,000
2.11.06 .101.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Kota Palu	20	50,000,000	APBD		20	57,500,000
2.11.06 .101.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13 Kab/Kota	1	150,000,000	APBD		1	172,500,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui yang ditingkatkan kapasitasnya		100	40,000,000	APBD		100	46,000,000
2.11.07 .101	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui		3	40,000,000	APBD		3	46,000,000
2.11.07 .101.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lakol Pengetahuan Tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara	1	40,000,000	APBD		1	46,000,000
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya		84,6	150,000,000	APBD		84,6	172,500,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.08 .101	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		3	150,000,000	APBD		3	172,500,000
2.11.08 .101.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Kota Palu	1	10,000,000	APBD		1	11,500,000
2.11.08 .101.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Palu, Kab. Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Morowali Utara	1	115,000,000	APBD		1	132,250,000
2.11.08 .101.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Kota Palu	1	25,000,000	APBD		1	28,750,000
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup		76,5	35,000,000	APBD		76,5	40,250,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.09 .101	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diberikan/dilaksanakan ditingkat Provinsi		6	35,000,000	APBD		6	40,250,000
2.11.09 .101.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Kota Palu	6	35,000,000	APBD		6	40,250,000
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan		100	50,000,000	APBD		100	57,500,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.10.101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup		3	50,000,000	APBD		3	57,500,000
2.11.10.101.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	13 Kab/Kota	3	50,000,000	APBD		3	57,500,000
2.11.11	Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah		43	275,000,000	APBD		43	316,250,000
2.11.11.101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan dan Pengelolaan Timbulan Sampah		1	275,000,000	APBD		1	316,250,000
2.11.11.101.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Kota Palu	1	20,000,000	APBD		1	23,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.11.1 01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	1	20,000,000	APBD		1	23,000,000
2.11.11.1 01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	Kota Palu	1	20,000,000	APBD		1	23,000,000
2.11.11.1 01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah volume sampah dari kerjasam penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	Kota Palu	500	45,000,000	APBD		500	51,750,000
2.11.11.1 01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu	1	170,000,000	APBD		1	195,500,000
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP									
5.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		64	725,000,000	APBD		64	833,750,000
5.1.01.1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		90	276,000,000	APBD		90	317,400,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.1 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	276,000,000	APBD		1	317,400,000
5.1.01.1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1	40,000,000	APBD		1	46,000,000
5.1.01.1 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	30,000,000	APBD		1	34,500,000
5.1.01.1 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	10,000,000	APBD		1	11,500,000
5.1.01.1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	235,000,000	APBD		1	270,250,000
5.1.01.1 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	235,000,000	APBD		2	270,250,000
5.1.01.1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120,000,000	APBD		1	138,000,000
5.1.01.1 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	120,000,000	APBD		1	138,000,000

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54,000,000	APBD			62,100,000
5.1.01.1 09.01	Penyediaan Administrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2	30,000,000	APBD		2	34,500,000
5.1.01.1 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7	24,000,000	APBD		7	27,600,000
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		55,56 Persen	75,000,000	APBD		55,56 Persen	86,250,000
2.11.03 .101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sampel yang dianalisis		30	75,000,000	APBD		30	86,250,000

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana kerja dan pendanaan DLH Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2023			
			Target	Rp		
3	4	5	7	8	9	10
5.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64	9,041,533,767	Dinas Lingkungan hidup	
5.1.01.10	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	80	7,884,230		
5.1.01.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3	2,000,000		Kota Palu
5.1.01.10	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	2,000,000		Kota Palu
5.1.01.10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3,884,230		Kota Palu
5.1.01.10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90	7,817,533,767		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.10 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	6,841,533,767		Kota Palu
5.1.01.10 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	946,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	30,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	30,000,000		
5.1.01.10 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	30,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	350,985,770		
5.1.01.10 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7,500,000		Kota Palu
5.1.01.10 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	130,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	20,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	15,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	168,485,770		Kota Palu
5.1.01.10 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	10,000,000		Kota Palu

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.10 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	200,000,000		
5.1.01.10 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 8	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	260,100,000		
5.1.01.10 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	165,100,000		Kota Palu
5.1.01.10 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	95,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	375,030,000		
5.1.01.10 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	330,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	2,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	43,030,000		Kota Palu
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Wajib Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	550,000,000		
2.11.02.1 01	Rencana Perlindungan dan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ validasi	2 Dokumen	50,000,000		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.02.1 01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 Dokumen/Rekomendasi	50,000,000		Kab. Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Kota Palu
2.11.02.1 02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS Yang disusun dan diverifikasi	1 Dokumen	500,000,000		
2.11.02.1 02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	500,000,000		Kota Palu
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	55,56 Persen	400,000,000		
2.11.03.1 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	13 Lokasi	150,000,000		
2.11.03.1 01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 Dokumen	100,000,000		Kab. Morowali, Poso, Parigi Moutong
2.11.03.1 01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup Yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000		Kab. Banggai Kepulauan, Sigi, Kota Palu
2.11.03.1 02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang diberikan informasi	30 Orang	70,000,000		
2.11.03.1 02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Laporan	70,000,000		Kab. Morowali
2.11.03.1 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Jumlah Lokasi rehabilitasi dan restorasi	7 Lokasi	180,000,000		

	Lingkungan Hidup					
2.11.03.1 03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000		Kab. Banggai
2.11.03.1 03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	50,000,000		Kab. Banggai, Morowali, Poso
2.11.03.1 03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	30,000,000		Kab. Tolitoli
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dilakukan pembinaan	100 Persen	150,000,000		
2.11.04.1 01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola dan dilakukan pembinaan	2 Taman Kehati	150,000,000		
2.11.04.1 01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	25,000,000		Kota Palu
2.11.04.1 01.02	Pengelolaan Tanam Keaneekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Lokasi /5 Ha	80,000,000		13 Kab/Kota
2.11.04.1 01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembangan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	2 Orang	25,000,000		Kota Palu, Kab. Sigi
2.11.04.1 01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	1 Unit	20,000,000		Kab. Banggai Kepulauan, Sigi

2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	75 Persen	100,000,000		
2.11.05.1 01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	33.332.609 Ton	100,000,000		
2.11.05.1 01.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah Dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10,000,000		Kota Palu
2.11.05.1 01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan dengan Pemerintah Pusat Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1	90,000,000		13 Kab/Kota
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	63,04	200,000,000		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.06.1 01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina/diawasi	116	200,000,000		
2.11.06.1 01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20	50,000,000		Kota Palu
2.11.06.1 01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	150,000,000		13 Kab/Kota
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui yang ditingkatkan kapasitasnya	100	40,000,000		
2.11.07.1 01	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui	3	40,000,000		
2.11.07.1 01.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pemdampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lakol Pengetahuan Tradisional dan MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	40,000,000		Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan	84,6	150,000,000		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Untuk Masyarakat	kompetensinya				
2.11.08.1 01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3	150,000,000		
2.11.08.1 01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	1	10,000,000		Kota Palu
2.11.08.1 01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	115,000,000		Kota Palu, Kab. Donggala, Poso, Parigi Moutong, Sigi, Morowali Utara
2.11.08.1 01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1	25,000,000		Kota Palu
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	76,5	35,000,000		
2.11.09.1 01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diberikan/dilaksanakan ditingkat Provinsi	6	35,000,000		
2.11.09.1 01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6	35,000,000		Kab. Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Kota Palu

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	100	50,000,000		
2.11.10.1 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani dan disinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	3	50,000,000		
2.11.10.1 01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3	50,000,000		13 Kab/Kota
2.11.11	Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	43	275,000,000		
2.11.11.1 01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan dan Pengelolaan Timbulan Sampah	1	275,000,000		
2.11.11.1 01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1	20,000,000		Kota Palu
2.11.11.1 01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penganan Sampah pada Kondisi Khusus	1	20,000,000		Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu
2.11.11.1 01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan	1	20,000,000		Kota Palu

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan				
2.11.11.1 01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah volume sampah dari kerjasam penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	500	45,000,000		Kota Palu
2.11.11.1 01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1	170,000,000		Kab. Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Kota Palu
	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP					
5.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64	725,000,000		
5.1.01.10 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90	276,000,000		
5.1.01.10 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	276,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	40,000,000		
5.1.01.10 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10,000,000		
5.1.01.10 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	235,000,000		
5.1.01.10 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	235,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120,000,000		

**RENCANA KERJA DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.10 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	120,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54,000,000		
5.1.01.10 9.01	Penyediaan Administrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	30,000,000		Kota Palu
5.1.01.10 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	24,000,000		Kota Palu
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase lokasi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	55,56 Persen	75,000,000		
2.11.03.1 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sampel yang dianalisis	30	75,000,000		
2.11.03.1 01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	30	75,000,000		Kota Palu

BAB 5

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development*) yang ramah lingkungan (*environmentally sound*), dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada pelestarian lingkungan benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.